



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2019/Periodik - 2018)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI BANTEN  
**SUB UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI BANTEN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : CHRISTANTO PUDJIONO
2. Jabatan : PANITERA MUDA HUKUM
3. NHK : 686438

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.790.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/135 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/60 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/80 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/60 m2 di DAIRI, WARISAN Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 180 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , WARISAN Rp. 540.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 202.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH JEEP Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 873.279**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 4.992.873.279

**III. HUTANG** Rp. 568.000.000



## IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.424.873.279

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **TIDAK LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **26 Desember 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.